

Ekspansi Hindia Belanda dan Runtuhnya Kekuasaan Elit Tradisional Kerajaan Koto Besar di Rantau Batanghari

Romi Arif¹, Nopriyasman², Mhd. Nur²

¹ Author, Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

² Corresponding Author, Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Email: romiarifarselan26@gmail.com, nopriyasman@yahoo.com, mnur1963@yahoo.com

Received 09 October 2019; Received in revised form 01 November 2019; Accepted 24 August 2020

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang ekspansi Pemerintah Hindia Belanda di wilayah Kerajaan Koto Besar, yang merupakan sapiah balahan dari Kerajaan Pagaruyung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode ilmu sejarah dan pendekatan ilmu-ilmu sosial sebagai alatnya. Tahap pertama dari penelitian ini, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Setelah data dikumpulkan dilanjutkan dengan kritik sumber dalam memperoleh fakta sejarahnya. Selanjutnya fakta tersebut diinterpretasi, hingga ditutup dengan historiografi (penulisan). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat relasi antara kedatangan Hindia Belanda dan runtuhnya kekuasaan elit tradisional di Kerajaan Koto Besar. Pada awalnya Belanda hanya meminta izin kepada Tuanku Koto Besar untuk menempatkan pasukan di wilayahnya. Dalam perkembangannya ternyata Belanda mempunyai maksud lain, yaitu ingin menguasai wilayah Koto Besar secara utuh. Hal ini berdampak pada kekuasaan elit tradisional yang sejak dahulu memiliki pengaruh di wilayah Kerajaan Koto Besar.

Kata kunci : ekspansi, kekuasaan, elit tradisional, kerajaan.

Abstract

This study discusses about expansion of the Dutch Indies Government in the area Kingdom of Koto Besar, which is a cow instead the Kingdom of Pagaruyung. This research was conducted using historical science methods and social science approaches as a tool. The first stage of this research, namely the collection of data carried out with literature and field studies. After the data is collected, it continues with source criticism in obtaining historical facts. Furthermore, these facts are interpreted, until closed with historiography (writing). The results of this study revealed that there was a relationship between the arrival of the Dutch East Indies and the collapse of the power of the traditional elite in the Kingdom of Koto Besar. At first the Dutch only asked permission from Tuanku Koto Besar to place troops in his territory. In its development, it turned out that the Netherlands had another purpose, which was to fully control the Koto Besar region. This has an impact on the power of traditional elites who have long had influence in the Koto Besar Kingdom.

Keywords: expansion, power, traditional elite, kingdom.

PENDAHULUAN

Pepatah adat Minangkabau mengatakan, “*Luhak bapangulu, rantau barajo*”, (*Luhak* berpenghulu, *rantau* beraja), yang bermakna pemerintahan di wilayah *luhak* diatur oleh penghulu, sedangkan untuk kawasan *rantau* diatur

oleh raja (Navis, 1984). Simbol kekuasaan seorang penghulu terletak di *nagari*, dan simbol kekuasaan seorang raja berada di daerah *rantau*. Di kawasan *rantau*, terdapat berbagai kecenderungan penduduknya lebih berorientasi hirarki, dengan tipe

masyarakatnya yang otoritarian (Graves, 2007).

Secara etimologi istilah kerajaan berasal dari bahasa Yunani, *monos* yang berarti satu, dan *archein* yang bermakna pemerintah. Jadi secara konseptual kerajaan adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki, seperti raja, ratu, sultan, pangeran, haryapatih, kaisar, emir dan sebagainya, semua yang berada di wilayah kekuasaan pemimpin monarki harus menuruti perintah dan kehendaknya.

Jane Drakard dalam *A Kingdom of Words Language and Power in Sumatra*, menjelaskan bahwa kerajaan dalam konteks adat Minangkabau merupakan sebuah pengecualian dalam tatanan sebuah kerajaan sebagaimana yang dipahami di Indonesia. Lembaga kerajaan disimbolkan sebagai kesatuan Minangkabau bukanlah lembaga yang aktif, tetapi lebih sebagai lembaga yang mengambil jalan pasif (tidak bersifat militer), atau kerajaan dalam ciptaan "kata-kata". Kerabat kerajaan dihormati tetapi tidak mempunyai kuasa (*powerless*). Kerajaan di Minangkabau lebih merupakan wujud otonomi dan kebebasan untuk mengatur diri sendiri yang telah lama dijadikan ketetapan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Drakard, 1999).

Secara kultural Kerajaan Koto Besar merupakan salah satu kerajaan

rantau Minangkabau yang terletak di perbatasan Sumatera Barat dan Jambi (Kabupaten Dharmasraya). Sebelum abad ke-20 daerah ini disebut kawasan Rantau Batanghari. Rantau Batanghari terdiri atas tiga *lareh*, yaitu: Lareh Batanghari, Lareh Piruko dan Lareh Siat. Lareh Batanghari berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pulau Punjung yang dikenal sebagai *camin taruih* (perpanjangan tangan) Pagaruyung dan "Rajo Nan Tigo Selo", yaitu: Kerajaan Siguntur, Kerajaan Sitiung dan Kerajaan Padang Laweh, sedangkan Lareh Piruko dan Lareh Siat berada di bawah pengaruh Kerajaan Koto Besar (Efrianto & Ajisman, 2010).

Dalam catatan Belanda, Koto Besar merupakan sebuah daerah yang memiliki peranan yang cukup penting di wilayah Rantau Batanghari. Koto Besar adalah kawasan yang mempunyai nilai strategis sebagai penghubung antara *ikua darek kapalo rantau* Minangkabau di Sungai Pagu dengan wilayah teritorial Kerajaan Jambi. Koto Besar adalah ibukota pemerintahan Distrik Batanghari sebelum dipindahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Sungai Dareh tahun 1913 (Amran, 1981). Besarnya peran yang dimiliki oleh Kerajaan Koto Besar, disinyalir sebagai penyebab utama kolonial Hindia Belanda ingin menguasainya. Dalam buku Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang* disebutkan bahwa Koto Besar

merupakan salah satu daerah di Pulau Sumatera yang diharapkan Belanda takluk secara damai pada awal abad ke-20 (Amran, 1985). Koto Besar memang ditaklukkan tanpa perlawanan, karena salah seorang kemenakan Yang di Pertuan yang bergelar Tuanku Mudo, mulai menjalin hubungan dengan Belanda dan meyakinkan pihak kolonial bahwa para pemimpin di wilayah Batang Siat serta daerah-daerah lainnya yang berada di bawah supremasi Koto Besar akan bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda (*Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen & Batavia Albrecht*, 1907). Koto Besar menjadi bagian dari wilayah *Residentie Sumatera Westkust* pada tahun 1905, setelah melakukan perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda bersama penguasa lainnya di Distrik Batanghari (Amran, 1981).

METODE

Dalam melakukan penelitian, tulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah sebagai alatnya. Louis Gottschalk dalam *Mengerti Sejarah* menjelaskan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, dimulai dari pengumpulan data (heuristik), kritik, interpretasi, hingga penulisan (Gottschalk, 1985).

Pada tahap heuristik penulis melakukan pengumpulan data, sumber,

informasi dan jejak masa lampau baik bersifat primer maupun sekunder. Sumber primer penulis dapatkan dari repro peninggalan Kerajaan Koto Besar, seperti *tambo*, stempel kerajaan dan angka yang tertulis pada makam raja-raja Kerajaan Koto Besar. Sedangkan sumber sekunder penulis menggunakan karya atau buku yang berkaitan langsung dengan tema penelitian ini.

Setelah data atau sumber dikumpulkan maka penulis melakukan kritik terhadap sumber tersebut. Kritik terhadap sumber ini dapat digolongkan kedalam dua macam bentuk, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern yaitu kritik terhadap material bahan sumber yang mesti dipertanyakan dengan pertanyaan apakah sumber yang didapat merupakan sumber asli. Kritik intern yaitu kritik yang diberikan atas kandungan informasi yang diberikan oleh sumber-sumber tersebut. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena kebenaran sebuah penelitian dan hasil yang diciptakan tergantung kepada kebenaran fakta atau sumber yang didapatkan.

Setelah langkah ini selesai maka penulis melakukan interpretasi data, yaitu tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang akan digunakan dalam proses historiografi. Tujuan dilakukannya interpretasi sumber adalah untuk menemukan fakta yang akurat untuk dijadikan sebagai fakta sejarah

dan dipakai sebagai bahan sumber. Setelah melalui semua tahap tersebut, penulis menuliskan ke dalam bentuk tulisan cerita sejarah yang berkesinambungan dan bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terbentuknya Kerajaan Koto Besar

Proses terbentuknya Kerajaan Koto Besar memiliki keunikan dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain yang berada di daerah Rantau Batanghari. Jika kerajaan lain, syarat memiliki seorang raja adalah ketika jumlah penduduk yang mendiami daerah tersebut telah banyak atau terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan oleh ninik mamak setempat, kemudian mereka sepakat untuk mengirim utusan kepada penguasa Pagaruyung agar meletakkan seorang raja yang akan menjadi pemimpin di daerah tersebut. Berbeda dengan Kerajaan Koto Besar yang semenjak dibentuk telah memiliki seorang raja atau ratu, sebab daerah ini dibuka dan didirikan langsung oleh keturunan Kerajaan Pagaruyung, tanpa adanya permintaan ninik mamak dan tanpa ditemukannya penduduk yang mendiami kawasan tersebut (Efrianto & Ajisman, 2010).

Menelusuri sejarah Kerajaan Koto Besar, terutama pada masa-masa sebelum kedatangan Belanda seperti mengurai benang kusut yang tidak jelas

ujung pangkalnya. Tidak ditemukan bukti otentik dan tahun pasti kapan berdirinya kerajaan ini. Namun, berdasarkan angka yang tertulis pada sebuah stempel yang diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Koto Besar, diperkirakan kerajaan ini telah ada sejak akhir abad ke-17 Masehi, tepatnya setelah pemerintahan Sultan Ahmadsyah di Kerajaan Pagaruyung (1650-1682). Jika dikaitkan dengan situasi yang terjadi di Pagaruyung saat itu, seperti yang dikutip oleh M.D. Mansoer, dkk dalam buku "*Sedjarah Minangkabau*", bahwa dalam kurun waktu tahun 1678-1682, telah terjadi konflik saudara di Kerajaan Pagaruyung yang menyebabkan kerajaan ini terpecah belah (Mansoer, 1970). Ada kemungkinan keturunan Pagaruyung yang bermigrasi ke Koto Besar mempunyai hubungan dengan peristiwa tersebut, meskipun tak sepenuhnya asumsi ini dapat diterima.

Bila merujuk pada *tambo* Kerajaan Koto Besar dan cerita pewaris kerajaan yang terbangun melalui interaksi oral dari generasi ke generasi, sejarah awal terbentuknya Kerajaan Koto Besar tidak dapat dipisahkan dari cerita kedatangan Tuan Puti Langguk bersama rombongan dari Pagaruyung untuk melarikan diri ke wilayah tersebut. Konon kabarnya Tuan Puti Langguk merupakan adik Raja Pagaruyung, Tuanku Sultan Sahih Alam dan Tuan Gadih Pagaruyung. Dikisahkan ketika masih tinggal di Pagaruyung,

Tuan Puti Langguk menderita penyakit kusta sehingga diasingkan oleh keluarganya ke tepi Batang Silo agar penyakit tersebut tidak menular pada orang lain. Di tempat pengasingan itu, Tuan Puti Langguk dibuatkan sebuah pondok kecil sebagai tempat tinggal, diantarkan makanan setiap harinya dan dicarikan obat ke berbagai tempat di kawasan Pagaruyung.

Setelah bertahun-tahun lamanya ia diasingkan, bermacam-macam obat telah dicoba dan puluhan tabib silih berganti datang mengobatinya. Malang tak dapat ditolak untung tak juga mampu diraih, penyakit yang diderita Tuan Puti Langguk tidak juga kunjung membaik. Lama-kelamaan keluarganya mulai bosan dengan kondisi ini, sehingga mereka lupa mengantarkan makanan kepadanya. Tuan Puti Langguk beranggapan jika kakak-kakaknya tidak lagi sayang kepadanya. Oleh karena itu, ia bersedih hati dan menangis sepanjang hari meratapi nasib yang dideritanya.

Pada suatu hari, muncul keinginan Tuan Puti Langguk untuk melarikan diri dari Pagaruyung ke sebuah tempat yang cukup jauh. Ketika niatnya telah bulat untuk meninggalkan Pagaruyung, ia masih menyempatkan diri untuk pulang ke rumah *gadoang*. Setelah sampai dirumah *gadoang*, dia tidak menemukan kakak-kakaknya. Pada waktu itu yang berada di rumah hanyalah para penjaga rumah, yaitu Datuak Rajo Sampono,

Datuak Rajo Lelo, Datuak Rajo Sailan dan Datuak Mangkuto Alam. Melihat kedatangan Tuan Puti Langguk, keempat penjaga rumah ini heran dan terkejut. Mereka lantas bertanya kepada Tuan Puti Langguk, apa sebenarnya yang terjadi sehingga Tuan Puti Langguk pulang dari pengasingan. Ia menceritakan keadaan yang sesungguhnya, tentang malangnya nasib yang dia derita, sehingga saudara-saudaranya tidak menganggap dia layak sebagai keluarga. Tuan Puti Langguk juga bercerita tentang keinginannya untuk meninggalkan Kerajaan Pagaruyung untuk selamanya. Keempat penjaga rumah ini merasa sedih dan kasihan dengan kondisi yang dialami oleh Tuan Puti Langguk. Salah seorang dari mereka berujar, “jika Tuan Puti meninggalkan Pagaruyung, sudilah kiranya Tuan Puti mengajak kami”. Setelah ditemukan kata sepakat, akhirnya keempat penjaga rumah ini ikut melarikan diri bersama Tuan Puti Langguk.

Tak banyak yang bisa mereka bawa ketika meninggalkan negeri Pagaruyung. Berbekal sebuah keris, sebatang tombak, sebuah kalung dan *uncang* sirih, serta sebilah pedang Janawi dan *ladiang concang latiah*, maka berangkatlah rombongan ini menuju arah matahari terbit. Mereka mulai melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, mengikuti jalan

yang telah ditempuh orang-orang sebelumnya. Lama berjalan, mereka sampai di sebuah kampung yang disebut Pincuran Tujuh (Tanjung Ampalu). Mereka berhenti sejenak untuk melepas lelah dan penat karena seharian berjalan dari Pagaruyung. Setelah merasa cukup beristirahat mereka kembali melanjutkan perjalanan, hingga beberapa hari kemudian rombongan ini sampai di Jambu Lipo.

Perjalanan dari Jambu Lipo dilanjutkan menuju Bukit Kalampang (perbatasan Kampung Surau dan Lubuk Bulang). Di sini, mereka bertemu sebuah sungai yang sangat besar dan berarus deras, sungai tersebut bernama Batanghari. Dalam menyeberangi sungai tersebut, mereka dibantu oleh seseorang yang baik hati dan berjiwa mulia, untuk membalas jasa orang baik hati tersebut, akhirnya ia diberi gelar Datuak Rajo Adil. Setelah menyeberangi Batanghari, rombongan ini terus melanjutkan perjalanan hingga berhenti di Batang Marabau (Sikabau). Setelah itu, mereka kembali berjalan hingga bertemu lagi dengan sebuah sungai. Di tepi sungai inilah, rombongan Tuan Puti Langguk bertemu dengan *urang tuo* yang ternyata juga sedang dalam perjalanan seorang diri. *Urang tuo* tersebut bergelar Datuak Bandaro Sati.

Tuan Puti Langguk menanyakan nama tempat mereka singgah, tetapi *urang tuo* tersebut tidak bisa menjawab

karena dia juga baru sampai di lokasi tersebut. Mereka sepakat memberi nama tempat ini Sungai Sakaian Tapa, karena ditemukannya bekas pertapaan di tepi sungai tersebut. Sedangkan anak sungai (sungai yang menumpang) di dekatnya, di beri nama Batang Ciek (Batang Siat). Tuan Puti Langguk mengajak *urang tuo* tersebut untuk pergi dengan rombongannya, tetapi dia lebih memilih menetap di sana. Setelah dari Batang Siat, rombongan Tuan Puti Langguk sampai di sebuah sungai yang bercabang dua, mereka memilih simpang yang ke kanan, yaitu Sungai Baye. Mereka terus menyusuri sungai itu ke arah hulu, sehingga sampai di sebuah tempat (Koto Tuo) yang dianggap cocok sebagai tempat bermukim oleh rombongan dari Pagaruyung. Namun, ketika akan mendirikan sebuah rumah, mereka melihat bahwa di kawasan ini masih terlihat kulit kelapa yang terbawa dari hulu sungai, maka mereka berpendapat di atas mereka masih ada penduduk yang bermukim.

Rombongan ini kembali melanjutkan perjalanan dan berencana akan tinggal di Koto Pandan, ternyata mereka masih menemukan hal yang sama. Mereka melanjutkan perjalanan ke Taluk Bano dan masih menemukan hal serupa, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang disebut Bukit Mambang Biru Kelapa Timbul, sebuah tempat yang benar-benar baru

yang hulu sungainya diperkirakan tidak ada lagi masyarakat yang bermukim, tempat inilah yang kemudian hari diberi nama Koto Besar. Seiring perkembangan waktu, masyarakat yang tinggal di Koto Besar semakin ramai. Oleh karena itu, mereka mulai *menaruko* ke daerah-daerah di sekitar Batang Siat, seperti: Bonjol, Abai, Bulangan, Ampang Kuranji dan Koto Baru. Tuan Puti Langguk menunjuk orang-orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin (*urang gadang*) di daerah baru tersebut, yaitu: Datuak Tan Majo Lelo di Bonjol, Datuak Rajo Sampono di Abai, Datuak Bandaro Rajo di Bulangan, Datuak Rajo Lelo di Ampang Kuranji dan Datuak Rajo Sailan di Koto Baru.

Pada suatu hari Tuan Puti Langguk berencana mengadakan sebuah sayembara, bagi siapa yang bisa menyembuhkan penyakit yang dideritanya akan diberi imbalan berupa dua kantong emas. Setelah sayembara diumumkan banyak tabib yang mendatangi Tuan Puti Langguk, tetapi tak seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Tuan Puti Langguk akhirnya sembuh dengan sendirinya, berkat sebuah do'a yang disebut "Doa Gagak Putih".

Berita tentang kesembuhan Tuan Puti Langguk akhirnya sampai ke Pagaruyung. Mendengar berita kesembuhan adiknya, maka berangkatlah rombongan Sultan Sahih

Alam untuk mencari sanak saudaranya yang telah mengasingkan diri ke Koto Besar. Bersama rombongan tersebut juga turut serta Tuanku Bandaro dari Sungai Tarab, lelaki pilihan Sultan Sahih Alam yang akan dijodohkan dengan adiknya, agar dia mau kembali ke Pagaruyung. Setelah beberapa hari di perjalanan, rombongan ini akhirnya sampai di Koto Besar dan bertemu dengan karib kerabat mereka yang dahulunya tinggal di Pagaruyung. Sultan menyampaikan maksudnya, bahwa ia ingin menjodohkan Tuan Puti Langguk dengan Tuanku Bandaro. Mendengar apa yang disampaikan kakaknya, Tuan Puti Langguk menerima saja perintah dari sang kakak dan akhirnya ia menikah dengan Tuanku Bandaro.

Setelah upacara perkawinan selesai, Sultan Sahih Alam mengutarakan niat utamanya, yaitu mengajak sang adik untuk kembali tinggal di Pagaruyung. Permohonan tersebut langsung ditolak oleh Tuan Puti Langguk. Sultan Sahih Alam terus membujuk dan berusaha meyakinkan adiknya, tetapi selalu saja ditolak oleh sang adik. Tuan Puti Langguk menjelaskan alasannya, bahwa kedatangan sultan sudah terlambat dan tidak pada waktu yang tepat. Dia juga bercerita sulitnya berjuang melawan penyakit yang dia derita dahulunya, sehingga dibuang oleh saudaranya sendiri.

Sepanjang cerita yang dituturkan oleh Tuan Puti Langguk membuat Sultan Sahih Alam marah karena merasa disalahkan oleh adiknya. Dalam suasana yang mulai tidak kondusif berbagai kata telah diucapkan, sehingga muncul sebuah sumpah yang melarang keturunannya untuk tidak saling mengunjungi, "*Kok ka basawah ndak manjadi, ka baayam manjadi kuuu, ka bakambiang manjadi kijang, ka batabu manjadi manau, kok ka pai ka Pagaruyung sakik paruik, mati kau*". (Jika ingin bersawah tidak akan berhasil, jika beternak ayam menjadi *kuuu* (sejenis burung liar), beternak kambing menjadi kijang, menanam tebu menjadi *manau* (sejenis rotan), jika Tuan Puti Langguk pergi ke Pagaruyung menderita sakit perut dan mati).

Dalam sumpah tersebut dijelaskan, bahwa perempuan Koto Besar tidak pernah bisa masuk ke Pagaruyung, demikian pula sebaliknya laki-laki Pagaruyung tidak akan bisa menginjakkan kaki di Koto Besar. Masyarakat Koto Besar akan sulit menanam padi di sawah dan sulit memiliki hewan ternak. Sumpah terlarang ini bertahan cukup lama dan dipercayai oleh perempuan pewaris Kerajaan Koto Besar sebagai pantangan yang tak boleh dilanggar. Bagi siapa yang berani melanggar sumpah tersebut diyakini akan menderita penyakit *modu*,

sejenis sakit perut kronis yang sukar sekali obatnya.

Berdasarkan penuturan pewaris Kerajaan Koto Besar, kisah sumpah terlarang antara Koto Besar dan Pagaruyung, sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Koto Besar. Sejak dahulunya, para orang tua di Koto Besar selalu berpesan kepada anak perempuannya untuk tidak menginjakkan kaki di tanah Pagaruyung. Namun, ketika mereka bertanya apa alasannya, tidak ada penjelasan secara rinci dan seolah-olah ada yang disembunyikan. Meskipun demikian, perempuan Koto Besar menurut saja apa yang dipesankan tersebut, karena takut terjadi sesuatu yang mencelakakan dirinya.

Dalam realitanya, hubungan antara pewaris Kerajaan Koto Besar dan Pagaruyung memang cukup renggang. Meskipun silaturahmi tetap ada hanya saja tak seimbang, karena pihak laki-laki Koto Besar saja yang berkunjung ke Pagaruyung, begitu juga sebaliknya. Pada masa Hindia Belanda anggota keluarga pewaris Kerajaan Koto Besar pernah ingin bertolak ke Pagaruyung. Dia terlebih dahulu ke Padang, kemudian melewati Lembah Anai, Padang Panjang dan Kubu Karambia. Setelah sampai di Kubu Karambia, tiba-tiba saja anggota keluarganya itu sakit perut, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk bertandang ke Pagaruyung.

Sepanjang sejarahnya, sebagaimana yang diketahui oleh pewaris Kerajaan Koto Besar tak seorang pun anggota keluarga Kerajaan Koto Besar yang melanggar sumpah tersebut. Tak satu pun perempuan Koto Besar yang berani menginjakkan kaki di Pagaruyung, hingga sumpah tersebut dicabut oleh kedua belah pihak dalam prosesi "*maungkai sumpah, mambuka kabek*", (menanggalkan sumpah, membuka ikatan) pada tanggal 25 Mei 2013 di kediaman Tuanku Kerajaan (Padang Ekspres, 2013).

Kedatangan Belanda di Koto Besar

Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Koto Besar pada akhir tahun 1890-an. Belanda datang ketika tatanan adat Minangkabau di daerah *darek* telah berhasil mereka otak-atik dan menciptakan aristokrasi baru di kawasan tersebut. Dalam pasal 2 Plakat Panjang disebutkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda sama sekali tidak ikut campur dalam pemerintahan adat *nagari* di Minangkabau, begitu pula tidak dalam hak kekuasaan para penghulu adat. Namun, dalam pasal 3 Plakat Panjang segera disusul dengan kalimat bahwa pemerintah akan mengangkat beberapa penghulu sebagai wakil Pemerintah Hindia Belanda yang digaji dan akan bertindak sebagai wakil pemerintah dengan rakyat Minangkabau. Pada hakikatnya antara kedua pasal ini

saling bertentangan, yang satu berjanji tidak akan mencampuri urusan pemerintahan adat tradisional, yang satu lagi justru ikut mencampurinya. Apa yang dilakukan Belanda itu ialah menciptakan suatu pemerintahan paralel, guna menyaingi dan akhirnya menghancurkan pemerintahan tradisional yang telah berjalan selama berabad-abad di daratan Minangkabau (Amran, 1985).

Sebelum Belanda memasuki wilayah Koto Besar, dahulunya daerah ini merupakan sebuah negeri yang merdeka. Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Rantau Batanghari, masyarakat Koto Besar sangat bangga dengan kemerdekaan itu. Sebenarnya para penguasa lokal di Rantau Batanghari telah sepakat tidak akan mengizinkan Belanda masuk ke wilayah mereka. Baik ketika ekspedisi Veth tahun 1877), maupun ekspedisi Yzerman tahun 1895 (Amran, 1981). Namun, Belanda tetaplah Belanda dengan segala tipu dayanya, dengan berbagai macam cara akhirnya mereka berhasil memasuki wilayah ini. Belanda masuk ke wilayah Koto Besar melalui Muaro Labuh dan Rantau XII Koto. Sebelum memasuki kawasan itu, mereka terlebih dahulu mengirim utusan untuk menemui Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja. Menurut ceritanya Belanda datang sebagai "orang baik" yang ingin mengamankan daerah ini, sekaligus menghindari

serangan rakyat Jambi terhadap daerah Muaro Labuh. Memang pada saat itu Belanda sedang berperang melawan Jambi. Oleh karena itu, Belanda ingin menempatkan pasukannya di area yang dekat ke perbatasan Jambi dan Koto Besar adalah lokasi yang cocok dalam menerapkan strategi ini (*Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen & Batavia Albrecht*, 1907).

Berkaca kepada apa yang dilakukan Belanda terhadap daerah-daerah lainnya di Nusantara, dapat dipastikan kunjungan pertama Belanda ke Koto Besar merupakan kabar buruk bagi Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja dan segenap masyarakat di wilayah Kerajaan Koto Besar. Seperti biasa, ketika izin masuk ke sebuah wilayah telah berhasil didapatkan, maka secara bertahap Belanda akan mencari kelemahan daerah tersebut. Mereka terlebih dahulu menjalin hubungan baik dengan para penguasa yang mudah dipengaruhi, mengenal kondisi geografis dan bentangan alam daerah tersebut, mempelajari budaya masyarakatnya, kemudian memetakan kekuatan perangnya. Strategi seperti ini juga diterapkan Pemerintah Hindia Belanda di wilayah Kerajaan Koto Besar. Setelah mengetahui bahwa Koto Besar bukanlah kerajaan yang memiliki pasukan perang, Belanda menetapkan daerah ini sebagai salah satu negeri yang akan ditaklukkan secara damai. Memang tak ada catatan

sejarah yang menjelaskan peperangan yang terjadi antara Koto Besar dan Belanda, sehingga diperkirakan Koto Besar takluk tanpa perlawanan (Amran, 1985).

Penghianatan Keluarga Kerajaan

TuanKu Koto Besar, Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja seperti yang diceritakan Belanda, merupakan seorang pemberani. Selama menjabat sebagai TuanKu Koto Besar, dia mampu memperluas daerah pengaruhnya ke Rantau Salak, Jujuhan, Indamar, Batu Kangkung dan Sungai Kunyit. Namun, keberanian Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja tidak didukung oleh orang-orang kepercayaannya, seperti Angku Sungut dan kemenakan kandungnya sendiri, TuanKu Mudo, yang kemungkinan besar akan menjadi penggantinya jika ia meninggal dunia (*Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen & Batavia Albrecht*, 1907).

Menarik untuk dibahas bagaimana karakter dan watak kedua tokoh yang berperan antagonis ini. Angku Sungut merupakan anggota keluarga kerajaan yang pertama kali menjalin kontak dengan Belanda. Dia menjadi orang kepercayaan sekaligus pendamping pejabat Belanda selama mereka melakukan aktivitas di Koto Besar. Banyak informasi tentang Kerajaan Koto Besar yang dibebarkannya pada Belanda, baik informasi tentang

keunggulan Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja maupun informasi tentang kelemahannya. Dalam analisa saya, Angku Sungut adalah otak dibalik keputusan Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja saat mengizinkan Belanda untuk menempatkan pasukan di wilayah ini.

Berbeda dengan Angku Sungut, sebenarnya Tuanku Mudo merupakan pemuda yang cerdas, sehingga ia terpilih sebagai kemenakan kesayangan Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja. Meskipun begitu, ia tidak mewarisi keberanian mamaknya. Ia cenderung penakut dan mengagumi orang Belanda, apalagi setelah mendengar keberhasilan tentara Belanda yang memenangkan peperangan melawan Jambi dan melumpuhkan Lubuk Gadang dalam satu kali serangan. Hal ini juga dipengaruhi oleh pengalaman buruknya saat ditemui tentara Belanda, ia dikejar kemudian dianiaya. Oleh karena itu, Tuanku Mudo berusaha menjalin hubungan baik dengan Belanda dan akan membujuk Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja untuk bersahabat dengan mereka (*Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen & Batavia Albrecht, 1907*).

Gayung bersambut, harapan Tuanku Mudo untuk bersahabat dengan Belanda mendapat respon positif dari pemerintah kolonial. Kontrolir Belanda, Palmer van den Broek mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Tuanku Mudo didorong oleh nafsu pribadinya

yang haus kekuasaan, tapi menjual nama Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja. Tuanku Mudo ingin mengamankan kedudukannya, jika suatu hari nanti dia menggantikan posisi Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja sebagai Tuanku Koto Besar. Selain itu, Broek juga beranggapan bahwa Tuanku Mudo mengincar jabatan dalam pemerintahan Hindia Belanda seperti Kepala Laras misalnya, sehingga bukan hanya Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja saja yang dia bujuk, tetapi seluruh *urang gadang* dan raja-raja kecil yang berada dibawah pengaruh Kerajaan Koto Besar juga dijanjikan akan tunduk kepada Pemerintah Hindia Belanda (*Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen & Batavia Albrecht, 1907*).

Selain Angku Sungut dan Tuanku Mudo, mungkin masih banyak tokoh antagonis lain yang ikut dalam kelompok mereka, hanya saja tak ada catatan sejarah yang menceritakannya. Meskipun begitu, penghianatan adalah bumbu dalam sebuah peperangan, baik itu perang fisik ataupun hanya perang politik. Seperti yang diungkapkan oleh pepatah, “Dimana ada kekalahan, sesungguhnya disitu terdapat penghianat. Dimana ada kekuasaan, maka disitu bercokol para penjilat.”

Runtuhnya Kekuasaan Elit Tradisional

Bernard Vlekke mengatakan, bahwa sejarah kerajaan di Nusantara

penuh dengan ketegangan dan konflik, kondisi ini menyebabkan mudahnya imperialisme Belanda menguasai kerajaan tersebut. Hal ini bukan karena kekuatan militernya yang sangat besar, tetapi karena kelemahan internal kerajaan yang sering bergesekan, penuh intrik dan ingin saling menguasai. Selain itu, kerajaan-kerajaan di Nusantara juga mudah menerima tamu asing, menjalin kontak dagang dan membuat “kontrak-kontrak” politik yang lebih banyak merugikan mereka. Kolonial Belanda mengambil keuntungan dari kondisi tersebut, jika kerajaan terlalu keras melakukan perlawanan maka diancam akan dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda, jika kerajaan tidak melakukan perlawanan sama sekali maka kerajaan itu lebih gampang dihapuskan. Kerajaan Koto Besar merupakan salah satu kerajaan yang dihapuskan oleh Belanda dan ditundukkan tanpa perlawananan (Vlekke, 2008).

Setelah berhasil menguasai Kerajaan Koto Besar, Belanda mengalihkan pandangan selanjutnya ke daerah-daerah di sekitar Lembah Batanghari. Perkara menakutkan Batanghari bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan Belanda, karena letak geografis Batanghari yang jauh dari pusat Alam Minangkabau dan dikuasai oleh banyak pemimpin-pemimpin lokal yang selama ini jarang terjadi konflik internal. Kesulitan lain ialah karena

daerah tersebut dipakai sebagai tempat pelarian kuli-kuli kontrak yang bekerja di tambang batubara Sawahlunto, dan lama sesudah itu, banyak pula orang Pidari melarikan diri ke daerah ini (Amran, 1981).

Pada tahun 1905, Belanda mengutus Houston Waler untuk mengadakan misi perdamaian dengan para penguasa yang ada di daerah Hiliran Batanghari. Pada mulanya raja-raja kecil yang berada di wilayah ini tidak mau berada di bawah pengaruh kekuasaan Belanda dan melakukan perlawanan yang membuat Houston Waler terbunuh. Belanda menyerang Hiliran Batanghari dengan kekuatan yang lebih besar dan mengancam para raja disana akan menetapkan denda sebanyak 300 gulden jika tidak mau menyerah. Kerajaan-kerajaan kecil yang berada di daerah Hiliran Batanghari tidak sanggup memenuhi denda yang dibuat Belanda dan tak mampu menghadapi tekanan yang dilancarkan penjajah tersebut. Oleh karena itu, raja-raja kecil ini mengajak segenap penduduk yang berada di wilayah ini untuk menghentikan perlawanan dan mengakui kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda (Amran, 1981).

Perjuangan berakhir, para raja akhirnya menandatangani perjanjian pendek saja dengan isi yang sama untuk semua daerah, termasuk wilayah adat Kerajaan Koto Besar. Perjanjian ini

ditandatangani oleh seluruh raja di Rantau Batanghari, seperti: Datuk Khatib Besar atas nama V Koto dan Padang Tarap, Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja atas nama Kerajaan Koto Besar, Tuanku Bagindo Majolelo atas nama Kerajaan Padang Laweh, Tuanku Bagindo Ratu atas nama Kerajaan Siguntur, Tuanku Sati atas nama Pulau Punjung dan beberapa pemimpin lokal lainnya. Dalam perjanjian tersebut, terdapat tiga kesepakatan yang semuanya menguntungkan pihak kolonial: *pertama*, semua raja di Rantau Batanghari mengakui bahwa daerah mereka adalah bagian dari Pemerintah Hindia Belanda dan dengan demikian di bawah kekuasaan Ratu Belanda; *kedua*, seluruh rakyat di Rantau Batanghari akan setia pada Ratu Belanda dan Gubernur Jenderal sebagai wakilnya di Negeri Hindia Belanda; dan *ketiga*, seluruh rakyat di Rantau Batanghari akan mentaati segala peraturan yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda dan seterusnya (Indisch Verslag, 1908).

Perjanjian yang sangat singkat, tapi mampu membuat segenap masyarakat di Rantau Batanghari tunduk dalam sesaat. Sejak saat itu, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Rantau Batanghari berada dalam *Onderafdeeling* Batanghari, dibawah kedudukan Pemerintah Hindia Belanda. *Onderafdeeling* Batanghari dibagi dalam

dua *district*, yaitu *District* Koto Besar dan *District* Batanghari. Pada mulanya Koto Besar adalah ibukota *Onderafdeeling* Batanghari. Namun, pada tahun 1913 ibukota *Onderafdeeling* Batanghari dipindahkan ke Sungai Dareh, karena melihat posisi geografis Sungai Dareh yang dekat dengan anak sungai Pangean dan sungai Takung sehingga lebih dekat untuk mencapai pusat Alam Minangkabau (Amran, 1981).

Pergantian kekuasaan yang ditandai jatuhnya Kerajaan Koto Besar ke tangan Pemerintah Hindia Belanda, maka berakhirilah kekuasaan elit tradisional di wilayah ini. Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja yang sebelumnya mempunyai marwah dan memiliki kedaulatan untuk penyelesaian berbagai masalah di wilayah Batang Siat dihancurkan leburkan oleh pemerintahan kolonial. Belanda berusaha merusak dan merubah struktur yang telah ada, serta mengurangi pengaruh Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja. Pemerintah kolonial mengharuskan pihak Kerajaan Koto Besar untuk membayar pajak dengan jumlah yang tidak sedikit, selain itu kolonial juga memaksa Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja untuk mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Akibat dari perjanjian tersebut, juga banyak benda-benda pusaka kerajaan yang diambil oleh Belanda sebagai cendera mata dan

bentuk pengakuan kepada kekuasaan kolonial.

Setelah sistem kerajaan dihapuskan, tradisi-tradisi Kerajaan Koto Besar mulai terputus dan berangsur-angsur hilang selama kolonisasi Belanda. Keluarga kerajaan yang sebelumnya bersuku Melayu Baye, berganti menjadi Suku Caniago demi kepentingan Pemerintah Hindia Belanda. Meskipun secara historis dan kultural Kerajaan Koto Besar tetap ada, tetapi peranannya setelah itu menjadi kabur dan cenderung tenggelam oleh kuatnya dominasi pemegang kekuasaan pada masa penjajahan. Para pewaris kerajaan tidak lagi menjadi bagian penting dalam perjalanan politik kekuasaan di Rantau Batanghari. Pemerintah kolonial secara bertahap mengganti kuasa Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja dengan Kepala Laras yang mendapatkan gaji dari pemerintahan kolonial. Berbagai perjanjian yang lahir antara pribumi penghianat dan pemerintahan kolonial semakin meminggirkan peran elit tradisional di Kerajaan Koto Besar.

PENUTUP

Kesimpulan

Koto Besar sebagai sebuah kerajaan di daerah *rantau* Minangkabau pada dasarnya memiliki kearifan tradisi dan nilai-nilai budaya yang menjadi *frame of reference* di wilayah

kekuasaannya. Secara kultural Kerajaan Koto Besar adalah kiblatnya adat untuk wilayah Lareh Batangsiat dan Piruko, sekaligus *pamuncak* bagi kerajaan-kerajaan kecil di Rantau Batanghari. Namun, kedatangan Belanda ke wilayah Kerajaan Koto Besar menjadi mimpi buruk bagi elit-elit tradisional di wilayah tersebut. Belanda datang sebagai tamu asing yang ingin bersahabat, tapi pergi dengan meninggalkan jejak yang membekas. Runtuhnya dominasi kekuasaan elit tradisional di Koto Besar yang ditandai dengan bergabungnya daerah ini dalam pemerintahan Hindia Belanda, secara otomatis pola kekuasaan pun berubah. Di Koto Besar muncul penguasa baru dengan gaya modern di bawah pengaruh Pemerintah Hindia Belanda.

Saran

Penelitian mengenai Ekspansi Hindia Belanda dan Runtuhnya Kekuasaan Elit Tradisional Kerajaan Koto Besar di Rantau Batanghari menarik untuk dikaji, karena ekspansi ini telah membawa serangkaian dampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat beberapa dekade setelah itu. Bahkan nantinya memungkinkan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, bagaimana keadaan masyarakat Rantau Batanghari setelah menjadi bagian dari Pemerintah Hindia Belanda, apakah ada perlawanan fisik dari

masyarakat lokal dan bagaimana pergerakan Belanda untuk mengeruk kekayaan alam yang terkandung di wilayah tersebut.

Tambo Kerajaan Koto Besar. *Sejarah Anak Nagari Koto Besar yang Datang dari Pagaruyung Minangkabau*.

Vlekke, B.H.M. (2008). *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

Amran, R. (1981). *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan.

Amran, R. (1985). *Sumatra Barat Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan.

Drakard, J. (1999). *A Kingdom of Word Language and Power in Sumatra*. New York: Oxford University Press.

Efrianto dan Ajisman. (2010). *Sejarah Kerajaan - Kerajaan di Dharmasraya*. Padang: BPSNT Padang Press.

Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Graves, E. (2007). *Asal-usul Elite Minangkabau Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mansoer, M.D., dkk. (1970). *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhratara.

Navis, A.A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Press.

Nota Omtrent de Middelen van Bestaan der Bevolking in Kota Basar en Onderhoorige Landschappen en de Batanghari Districten dan Nota over Kota Basar en Onderhoorige Landschappen Met Uitzondering van Soengei Koenit en Talao, dalam *Tijdschrift voor Indische, "Taal, Land en Volkenkunde"*. Batavia: Kerjasama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dan Batavia Albrecht & Co. 1907.

Overeenkomsten met Inlandsche vorsten, landschappen in het stroomgebied Batanghari. Indisch Verslag. 1908.

